

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :

KOTA JAKARTA TAHUN 1950-1980:
SEBUAH TINJAUAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA

oleh :

Irmawati M. Johan

Dibiayai dari Dana DIP OFFSUI

Tahun 1991/1992

PERPUSTAKAAN
CAKILITAS.SASTRA

Lembar Identitas dan Pengesahan
Laporan Akhir Hasil Penelitian

1. Judul : KOTA JAKARTA TAHUN 1950-1980: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA
2. Kepala Proyek Penelitian
 - a. Nama Lengkap : Irmawati M. Johan
 - b. Jenis kelamin : wanita
 - c. Pangkat Golongan dan NIP: III A/ 131.473.854
 - d. Fakultas : Sastra
 - e. Universitas : Indonesia
 - f. Bidang ilmu yang diteliti: Sejarah kota
3. Jumlah peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : Jakarta
5. Bila Penelitian ini merupakan kerjasama kelambagaan sebutkan :
 - a. Nama instansi :
 - b. Alamat :
6. Jangka waktu penelitian : 3 (tiga) bulan
7. Biaya yang digunakan : -

Jakarta, 7 Januari 1993

Mengetahui

Pimpinan Kelembagaan

Mengetahui
Dekan Fakultas
u.b.



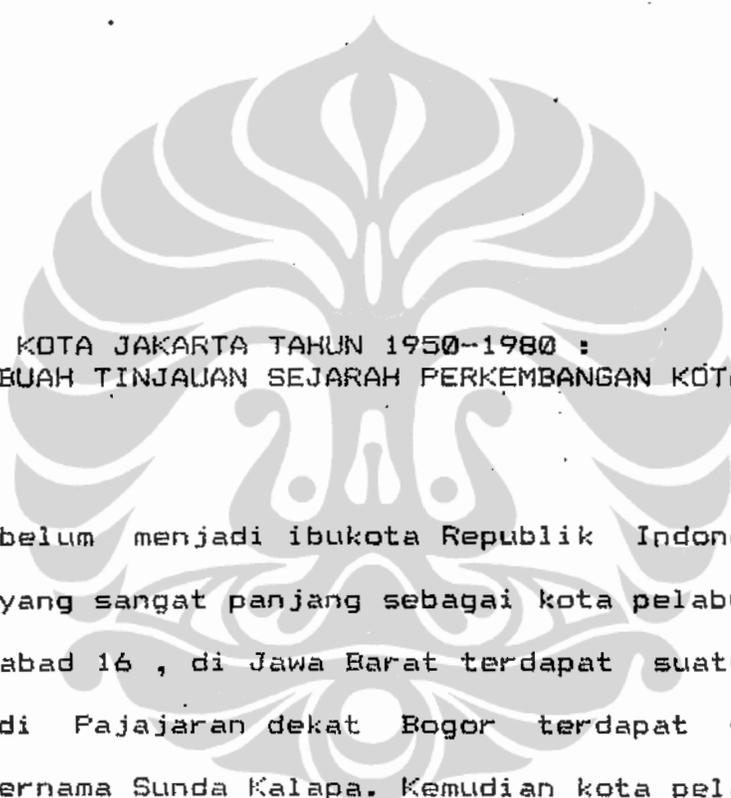
Dr. Sapardi Djoko Damono
NIP. 130.237.488



Kepala Proyek Penelitian



Irmawati M. Johan
NIP. 131.473.854



KOTA JAKARTA TAHUN 1950-1980 :
SEBUAH TINJAUAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA

I. Pendahuluan

Jakarta sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia telah melampaui masa yang sangat panjang sebagai kota pelabuhan. Pada abad 12 sampai abad 16 , di Jawa Barat terdapat suatu kerajaan yang berpusat di Pajajaran dekat Bogor terdapat suatu kota pelabuhan yang bernama Sunda Kalapa. Kemudian kota pelabuhan ini direbut oleh kerajaan Demak di bawah pimpinan Falatehan, kemudian nama kota diganti dengan nama Jayakarta. Perubahan nama kota Jayakarta terjadi lagi pada masa VOC yang berhasil merebut Jayakarta pada abad ke-17 dan menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan. Nama yang diberikan VOC adalah Batavia. Penguasaan VOC atas Batavia berakhir pada abad ke 18, yaitu setelah dibubarkannya VOC oleh pemerintah Belanda. Untuk selanjutnya

didirikan suatu badan yang memerintah di daerah ini yang dinamakan Nederlandsch Indie dan Batavia dipakai sebagai ibukotanya (Leirissa 1982:14-15).

Kota Batavia dibangun oleh Jan Pieterzoon Coen di atas puing reruntuhan Jayakarta dan polanya mengikuti pola kota Belanda. Rencana kota berbentuk segi empat mengikuti rumusan benteng Romawi. Bentuk segi empat ditempatkan pada lokasi Pasar Ikan dan pada tempat itu dibangun sebuah benteng memanjang ke arah selatan hingga belokan Sungai Ciliwung. Kota Batavia dikelilingi parit dan tembok kota yang mana diperkuat dengan benteng-benteng kecil. Penduduk asli tidak diperkenankan membuat kampung di dalam tembok kota. Sungai Ciliwung dialihkan alirannya dengan sebuah terusan yang dinamakan Kali Besar yang memotong kota menjadi dua bagian (Siswadi 1982:36).

Pada sebuah peta yang dibuat oleh Francis van Berkerode yang dibuat sekitar tahun 1625, ternyata sudah dimulai perluasan kota ke arah tepi barat sungai Ciliwung yang dilaksanakan oleh orang-orang setelah masa Coen. Kemudian dari peta yang dibuat oleh Clement de Jonghe (1650) ternyata telah ada perubahan besar-besaran dalam rencana kota. Terusan miring di sebelah timur dikeringkan dan diganti dengan sebuah terusan yang sejajar dengan Ciliwung. Kemudian bagian kota sebelah selatan dipisahkan dari kota yang sebenarnya dan bagian kota sebelah barat telah diperluas. Yang menyolok adalah perencanaan jalan yang sangat beraturan. Sungai Ciliwung yang diluruskan alirannya pada kedua tepinya dibangun jalan yang lebar dengan demikian perniagaan yang terjadi disepanjang sungai dapat ditampung, sedangkan Prinsesaat sebagai daerah pemerintahan ditempatkan agak

dibelakang. Selain jalan-jalan bagian-bagian kota juga ditata dengan baik, di seberang Kasteel terdapat bengkel-bengkel dan gudang perbekalan. Perdagangan dipusatkan di Kali Besar dan tempat tinggal untuk tenaga kasar dipusatkan di timur kota, sedangkan sepanjang terusan kearah utara-selatan untuk pemukiman (Siswadi 1982:37).

Pada masa pemerintahan Deandels (1811-1816), pusat pemerintahan dipindahkan ke Weltevreden yang merupakan kota baru. Inti kota ini sekarang kira-kira berada di Lapangan Banteng, di mana kemudian ia mendirikan sebuah istana. Sementara itu kantor-kantor perdagangan tetap dipertahankan di kota lama. Dalam perkembangannya ternyata perkembangan kota jauh lebih cepat, terjadi pembangunan rumah-rumah di sepanjang jalan raya, terutama lagi sepanjang jalan menuju ke luar kota. Pembangunan seperti ini mengakibatkan bercampur aduk segala macam bangunan, seperti gedung-gedung pemerintahan, rumah tinggal, bengkel dan lain-lain.

Akibat dari perkembangan yang tidak teratur, maka timbul masalah-masalah yang berkaitan, misalnya perkembangan lalu-lintas, listrik, gas, saluran air dan lain-lain. Kekacauan yang telah dimulai dari abad ke 19 dilanjutkan pada abad ke 20, bahkan lebih parah lagi karena tidak ada suatu zoning yang efisien (Siswadi 1982:43-45). Yang menjadi salah satu masalah besar pada abad ke 20 di Jakarta adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga diperlukan banyak tanah yang dapat menunjang segala kebutuhan bagi masyarakat.

Pada uraian selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana perkembangan kota Jakarta beserta sarananya dari tahun 1950

sampai tahun 1979. Adapun pembabakannya dibagi :

1. Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1950-1960
2. Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1960-1970
3. Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1970-1980

Berikut ini adalah beberapa catatan mengenai administrasi kota. Pada abad ke 19 yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Batavia merupakan suatu Karesidenan. Karesidenan ini dibagi lagi menjadi lingkungan-lingkungan yang lebih kecil yang dinamakan afdeling. Hal ini berlaku sampai dengan awal abad ke 20. Afdeling ini dibagi dalam 5 daerah :

1. Afdeling Stad an Voorsteden van Batavia
2. Afdeling Meester Cornelis
3. Afdeling Tangerang
4. Afdeling Buitenzorg
5. Afdeling Krawang

Untuk afdeling Stad en voorsteden van Batavia dibagi lagi menjadi 4 distrik, yaitu : Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang juga termasuk pulau-pulau di teluk Batavia dan sebelah utaranya (The liang gie 1958:31).

Pada tanggal 1 April 1950, batavia ditetapkan menjadi sebuah Gemeente, yaitu sebuah daerah lokal yang memiliki keuangannya sendiri. Batas wilayah Gemeente Batavia kira-kira 125 km² tidak termasuk pulau-pulau yang ada di teluk Batavia.

Untuk mempermudah operasi pemerintahan Pamongpraja, afdeling Stad en Vorsteden van Batavia dibagi menjadi dua district dan enam onder district yang masing-masing dikepali oleh wedana dan asisten wedana. Pembagian district dan onder district tersebut

adalah :

District	Onder District
1. Batavia	1. Mangga Besar
	2. Penjaringan
	3. Tanjung Priuk
2. Weltevreden	4. Gambir
	5. Senen
	6. Tanah Abang

Ke enam Onder district ini dibagi lagi ke dalam Wijk-wijk yang semula berjumlah 27, kemudian masing-masing wijk dibagi lagi ke dalam kampung-kampung (The liang gie 1958:34-35).

Pada tahun 1926, luas wilayah Stadsgemeente Batavia menjadi 182 km² sebagai akibat dari penghapusan Stadsgemeente Meester Cornelis dan wilayahnya digabungkan kepada wilayah Stadsgemeente Batavia.

Setelah kota Batavia jatuh ketangan Jepang pada tahun 1942, maka dikeluarkan Undang-undang 1942 no 42 tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Menurut Undang-undang tersebut Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut SYUU (Karesidenan). Setiap Syuu dibagi dalam beberapa Ken (Kabupaten) dan Shi (Stadgemeente).

Di dalam UU no 28 tahun 1942, kepala pemerintahan Jepang atau Gunsuiken dapat membentuk Tokubetshu Shi (Stadsgemeente luar biasa). Jakarta kemudian dijadikan Jakaruta Tokubetshu Shi dipimpin oleh Tokubetshu shityo dan beberapa orang Zyoyaku (pegawai tinggi) dan masing-masing diangkat oleh Gunsuiken.

Ketika proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945;

Jakaruta Tokubetshu Shi dirubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Namun ketika pemerintahan Nica berkuasa, walikota Jakarta dan beberapa pejabat ditangkap dan diusir. Maka habislah kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Pada tanggal 23 maret 1950 oleh Presiden RIS diangkat seorang Walikota Jakarta yang disusuk dentgan penyerahan kekuasaan pemerintahan pada tanggal 31 Maret 1950 dari wakil Gubernur Distrik Federal (Gubernur Batavia en Ommelanden) kepada Walikota. Penyerahan ini ditambah dengan beberapa wilayah baru, yaitu :

1. Pulau Seribu
2. Onderdistrik Cengkareng
3. Sebagian dari distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebonjeruk, kebayoran ilir dan kebayoran Udik).
4. Sebagian dari distrik Bekasi (Onderdistik Pulogadung dan sebagian onder. distrik Cilincing).

Dengan batas-batas yang baru ini maka luas wilayah Kotapraja Jakarta Raya menjadi kira-kira 530 Km², yaitu 3 kali luas wilayah Stadsgemeente Batavia.

Berdasarkan pada UU no.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah dikenal 2 macam kota otonom, yaitu Kotapraja Jakarta Raya yang berstatus daerah tingkat I, Kotapraja yang berstatus tingkat II dan daerah tingkat III. Maka realisasinya pada tanggal 15 Januari 1960 ialah ditetapkannya Kotapraja Jakarta raya sebagai daerah tingkat I dengan kepala daerahnya seorang Gubernur.

Karena sifatnya yang khusus dari Kotapraja Jakarta Raya, maka berdasarkan ketetapan Presiden no.2 tahun 1961 yang ditingkatkan

menjadi UU no.2 tahun 1961 dibentuk menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Baru pada tahun 1964 setelah ditetapkan dengan UU no.10 ditetapkan sebagai ibukota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Gita Jaya 1977:17).

Pada tanggal 24 Juli 1975 terjadi pembuktana wilayah Jakarta atas

1. Jakarta Pusat
2. Jakarta Utara
3. Jakarta Barat
4. Jakarta Selatan
5. Jakarta timur

Dari lima wilayah ini dibagi-bagi lagi atas 30 wilayah kecamatan dan 236 wilayah kelurahan (gita Jaya 1977:18 ;65).

II. Perkembangan kota Jakarta 1950-1980

II.1 Tanah dan penduduk

Dengan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke jakarta dan kedudukan Jakarta sebagai ibukota mengakibatkan makin meningkatnya kebutuhan akan kantor-kantor dan perumahan pegawai. Kecuali sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga berkembang sebagai kota industri dan perdagangan sehingga jumlah pendudukpun semakin meningkat terutama karena urbanisasi. Pada tahun 1950 penduduk jakarta 1.432.085 jiwa, sepuluh tahun kemudian (1960) menjadi duakali lipat lebih, yaitu 2.910.858 jiwa. Ini berarti pemerintah DKI Jakarta harus menyediakan tanah lagi untuk gedung-gedung dan perumahan. Usaha tersebut antara lain dilakukan dengan membebaskan tanah-tanah yang dulu milik tuan-tuan tanah dengan cara membeli.

Pada bulan Februari 1949 telah selesai dibuat sebuah rencana perluasan kota ke arah Kebayoran dengan luas 730 Ha. Daerah ini diproyeksikan sebagai daerah perumahan yang tepinya bersinggungan dengan jalan kereta api jurusan Tanah Abang- Tangerang. Realisasi dari rencana tersebut baru terwujud setahun kemudian. Tanah seluas 730 Ha dibagi untuk keperluan perumahan rakyat sebesar 152 Ha, Perumahan sedang 69,8 Ha, Villa 55,1 Ha, Bangunan istimewa 75,2 Ha, Flat 6,6 Ha, Toko 17 Ha, industri 20,9 Ha, Taman 118,4 Ha, jalan 181,5 dan sawah pinggiran 33 Ha. Semua ini dimaksudkan untuk memberi tempat kediaman bagi 100,000 penduduk (Surjomihardjo 1977:36,37).

Pada masa ini yang menjadi masalah utama adalah masalah tanah yang pemilikannya ada 4 macam :

1. Tanah kotapraja
2. Tanah negara
3. Tanah Individual
4. Tanah partikular

Adapun yang menjadi pemikiran Kotapraja adalah tanah partikular yang pada saat itu terdapat seluas 3.566 Ha. Tanah itu dikuasai oleh 16 perusahaan dan keadaannya sangat terlantar. Kampung-kampung yang berada di atas tanah partikular sangat kotor, Jalan-jalan tidak diaspal sehingga pada musim hujan akan sangat becek dan saluran air pembuangan tidak mengalir sehingga menimbulkan bau busuk. Keadaan perumahan penduduk saling berhimpitan, demikian pula dengan sumur dan tempat buang air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Pemerintah Kotapraja dalam hal ini ingin membeli kembali tanah-

tanah tersebut dan akan dilakukan pembangunan dan perbaikan kampung (Karya Jaya 1977:71).

Keadaan seperti ini sebenarnya adalah kelanjutan dari keadaan tanah pada masa sebelumnya, terutama pada masa pemerintahan Jepang, yaitu dari tahun 1942-1945. Pada masa itu kepada penduduk dianjurkan untuk menggarap semua tanah kosong dengan menanam sayur-sayuran dan pohon jarak tanpa mempedulikan kepunyaan siapa. Kepada penduduk juga diperbolehkan mendirikan gubug-gubug di kebun-kebun tersebut, sehingga lambat laun gubug-gubug tersebut menjadi bertambah besar dan berubah menjadi rumah-rumah sederhana. Pemakain tanah-tanah yang digarap oleh penduduk tidak dikenakan biaya sewa baik oleh pemerintah maupun oleh pihak partikular. Selain itu tidak diadakan pendaftaran sehingga tidak lagi diketahui tentang letak dan luas tanah, serta nama penggarap.

Pada masa pemerintahan Nasional tahun 1945-1947, pemerintah kota mengadakan pengumuman yang mengharuskan penduduk untuk mendaftarkan tanah garapannya. Kemudian pada tahun 1950 dari hasil notulen rapat Badan Pemerintah Harian persoalan tanah yang melanggar hukum mendapat perhatian kembali. Daerah-daerah yang menjadi tempat penghunian liar adalah daerah yang sekarang menjadi jalan M.H. Thamrin, Hotel Indonesia, Hotel Asoka dan Presiden Hotel (Karya Jaya 1977:37,39,41).

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat direncanakan pendirian kampung-kampung baru yaitu di Bendungan Hilir, Karet, Pasar Baru, Jembatan Duren dan Tanjung Grogol. Khusus daerah Tanjung Grogol akan dibangun 103 buah rumah yang akan dijual kepada rakyat. Bagi golongan kecil seperti tukang beca, penjual

makanan dan sebagainya, pemerintah daerah telah membangun beberapa perumahan darurat untuk disewa dengan ahrga ringan. Adapun lokasinya adalah di : Pisang batu, Karang Anyar I, Karang Anyar II, Tanjung Priok dan Tanah tinggi.

Untuk kebutuhan akan pelelangan ikan yang dihasilkan oleh para nelayan yang tinggal disepanjang pantai utara dan Pulau seribu oleh Pemerintah daerah telah ditetapkan 3 tempat pelelangan ikan yaitu ; Tanjung Priok, Pasar Ikan dan Kamal (Karya Jaya 1977:79).

Tanah-tanah sawah pada masa ini antara lain terdapat di daerah bagian Barat Cengkareng, bagian timur Klender dan bagian utara Tanjung Priok. Daerah-daerah yang menghasilkan bahan makanan seperti buah-buahan dihasilkan dari daerah selatan yaitu :Pasar Minggu, Pasar Rebo, Kebun Jeruk, Kebayoran dan Mampang Prapatan. Untuk kebutuhan susu diperoleh dari daerah Mampang Prapatan dengan produksi 8858 liter setiap hari. Dari daerah sepanjang pantai utara Jakarta menghasilkan ikan air tawar terutama iakan bandeng dengan empang seluas 1201,01 Ha, sedangkan daerah selatan menghasilkan ikan Gurame, Tawes dan ikan Mas dengan luas empang 658 Ha (kaya Jaya 1977:79).

II.2 Prasarana Umum

Prasarana umum yang terdapat di Jakarta tahun 1950-1960 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Listrik : Untuk mengatasi masalah listrik akan dibangun pembangkit baru di daerah Ancol.
- b. Air bersih : Untuk mengatasi masalah ini akan dibangun Waterzuivering di daerah Karet yang diperkirakan akan menambah

air sebanyak 5000 liter per detik. Yang penting pada masa ini dibuat instalasi pembersih air Pejompongan dengan bantuan PUTL dengan kapasitas 2060 liter/detik.

c. Penanggulangan Banjir ; Dibuat Rencana Pluit, yaitu dibuat rencana pembuatan waduk pengumpulan air banjir sungai Cideng, Krukut dan cabang-cabangnya dan kemudian air dipompa ke laut.

d. Jalan : Untuk memenuhi kebutuhan akan jalan maka dibangun Jakarta by pass .

e. Sarana ibadah : Pada masa ini dibuat persiapan pembangunan mesjid Istiqlal

f. Sarana Hotel : dilakukan pembebasan tanah untuk membangun Hotel Indonesia.

Selain proyek-proyek ini, juga dirumuskan rencana pembangunan dalam jangka panjang yang dituangkan dalam bentuk Rencana pendahuluan (Outline Plan) yang kemudian hari dikembangkan menjadi Rencana Induk (Master Plan) untuk kota Jakarta (Karya Jaya 1977:113,115).

III. Perkembangan kota Jakarta 1960-1970

III.1 Masalah Yang Timbul

a. banjir : Pada awal tahun 60 di Jakarta terjadi banjir, yaitu setelah mengalami musim hujan yang hebat sehingga 7 kelurahan sangat menderita, terutama daerah Grogol dan sekitarnya. Dengan makin banyaknya daerah yang dibangun maka volume air hujan yang harus ditampung dan dialirkan juga semakin bertambah. Hal ini dapat merubah tata perairan di bawah permukaan tanah kota yang sudah tidak menerima curahan air hujan tersebut (Tambunan 1985:1,8) Pada tahun 1965 daerah banjir dialokasi dan

dibuat rencana penanggulangan dalam Master Plan 1965-1985 yaitu dengan membuat waduk-waduk dan saluran kanal.

b. Kebakaran : Pada tahun 1959, Jakarta mengalami masa kemarau yang panjang. Tidak kurang dari 67 kali kebakaran besar terjadi. Kebakaran yang paling hebat terjadi di kampung-kampung yang padat dan liar (Karya Jaya 1977:203). Usaha penanggulangan untuk memperbaiki kampung baru dilaksanakan pada Pelita I dengan nama Proyek MHT.

c. Sampah : Masalah sampah adalah masalah sulit dan berbelit-belit. Adapun penyebabnya adalah pada sifat dan kebiasaan penduduk membuang sampah di mana saja dan juga karena semakin padatnya kota Jakarta. Usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah ini dilakukan dengan menghancurkannya dengan sistem pembakaran, penimbunan dengan tanah atau diolah oleh pabrik pembuatan pupuk (Master Plan 1965-1985:6).

d. Gelandangan : Pada tahun 1966 diperkirakan jumlah penduduk menapai 30.000 orang. Langkah yang ditempuh pemerintah daerah adalah dengan cara menyalurkan mereka pada lapangan kerja atau transmigrasi.

e. Penduduk : Dari hasil analisa yang dilakukan didapat bahwa kenaikan penduduk berdasarkan pertambahan alami setiap tahunnya adalah 2% sedangkan disebabkan urbanisasi 2 %. Dengan demikian kenaikan penduduk secara netto setiap tahunnya adalah 4 %. Atas dasar ini maka dapat diprediksi jumlah penduduk pada tahun 1985 adalah berjumlah 6.500.000 jiwa. Untuk menunjang pertambahan penduduk maka pada tahun 1985 dibutuhkan areal tanah seluas 50.000 Ha (Master Plan 1965-1985:7,8).

III.2 Prasarana Umum

Usaha-usaha pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan prasarana umum terus dilakukan antara lain :

- a. Pasar : Pada tahun-tahun ini dibuat beberapa rintisan pasar seperti pasar Cikini dan pasar Senen.
- b. Perumahan : Dalam usaha untuk menambah prasarana perumahan direnakan kota satelit Pulo Mas yang mendapat bantuan dari PBB dan negara Denmark sebagai perencana. Selain proyek ini juga dibuat proyek Cempaka Putih yang telah menyediakan tanah seluas 230 Ha.
- c. Rekreasi : Pembebasan tanah dilakukan di daerah Ancol yang direncanakan sebagai tempat rekreasi. Kemudian akan dibangun proyek Planetarium yang akan didirikan di atas tanah Kebon Binatang Cikini yang sekarang dikenal dengan nama Taman Ismail Marzuki. Untuk menampung kebun binatang Cikini, maka dibebaskan tanah di daerah Ragunan.
- d. Pendidikan/sekolah : Pengadaan gedung sekolah sebagai sarana pendidikan makin meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk. Fasilitas gedung SD, SLP dan SLA pada tahun 1966 seluruhnya berjumlah 1.081 buah, sedangkan anak usia sekolah berjumlah 500.000 orang. Untuk mengatasi hal ini, maka direncanakan akan dibangun SD sebanyak 124 buah dan yang direhabilitasi 15 buah. Untuk SLP dibangun 31 gedung dan yang direhabilitasi 4 gedung. Namun pembangunan ini juga masih belum mencukupi sehingga direncanakan akan terus ditambah pada PELITA I (Gita Jaya 1977:176).

e. Rumah sakit : Usaha yang dilakukan pemerintah daerah selain memberikan bantuan kepada rumah sakit swasta agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaiknya juga dengan cara membangun Puskesmas baik ditingkat kecamatan maupun Kelurahan. Selain itu juga diadakan kegiatan Karang Balita yaitu suatu pusat pembimbingan dan pembinaan kesehatan bagi anak-anak yang berumur di bawah lima tahun (Gita Jaya 1977:193-194).

Usaha lainnya adalah menaggulangi pengaruh obat bius dengan pembangunan Unit penyembuhan terhadap narkotika Untuk usaha rehabilitasi penderita (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:33). Kemudian juga yang menjadi salah satu program pemda DKI adalah Keluarga Berencana. Pada Pelita I yang menjadi target dari penurunan penduduk adalah 2,4% dari 2,6% angka kelahiran penduduk. Program ini antara lain diselenggarakan di PUSKESMAS (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:34).

f. Jalan dan Jembatan : Dalam rangka perbaikan dan normalisasi jalan, jalan-jalan di ibukota dibedakan menurut fungsinya yaitu : Jalan ekonomi, Jalan lingkungan dan jalan desa (Gita Jaya 1977:238) Pada tahun-tahun ini telah dilaksanakan rehabilitasi jalan ekonomi sepanjang 317 Km, peningkatan mutu jalan dan normalisasi jalan ekonomi sepanjang 200 Km. dan pembuatan jalan ekonomi yang baru sepanjang 3.500 M. Sedangkan untuk jalan lingkungan telah diperbaiki sepanjang 635 Km dan pembuatan serta perbaikan jembatan beton sebanyak 93 buah (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:55).

g. Angkutan umum : Pada dasarnya angkutan umum bertujuan untuk melayani kebutuhan penduduk. Bis kota yang beroperasi pada saat ini berjumlah 1.800 buah. Jumlah ini belum dapat mencukupi

kebutuhan penduduk. Dari jumlah penduduk yang harus diangkut diperhitungkan pada banyaknya penumpang yang harus diangkut pada "peak hour". Dari jumlah penduduk yang ada maka kebutuhan akan bis kota seharusnya adalah 3.100 buah dan pada tahun 1970 membutuhkan 5300 buah (Master Plan 1965-1985:13).

Selain sarana bus ditempuh pula pengadaan taxi yang sekarang berjumlah 871 buah. Sampai saat ini alat transportasi becak, bemo dan helicak masih memegang peranan penting. Tetapi telah direncanakan penghapusan becak pada tahun 1979, maka kendaraan pengganti harus sudah dipersiapkan (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:57).

Bagi pengangkutan umum antar kota dilayani oleh bis umum dan kereta api dan akan dipusatkan di terminal Manggarai yang direncanakan akan dibangun menjadi terminal pusat bagi penumpang yang masuk dan keluar Jakarta.

h. Tempat ibadah : Pembangunan sarana fisik keagamaan merupakan tugas dari Pemda DKI Jakarta yang dibantu swadaya masyarakat. Dari tahun ke tahun ternyata terjadi penambahan rumah ibadah. Pada tahun 1969 jumlah seluruhnya adalah 3.924 buah, jumlah ini meningkat menjadi 5.626 buah pada tahun 1973. Pada tahun 1970 jumlah seluruh rumah ibadah adalah 4.125 buah yang terdiri dari : Masjid 620 buah, Langgar 2.957 buah, gereja 431 buah dan kuil klenteng berjumlah 118 buah (LPDM FEUI 1981:45,47).

IV. Perkembangan kota Jakarta 1970-1980

IV.1 Pengembangan wilayah

Perkembangan kota Jakarta pada masa ini juga tetap mengikuti

Master Plan 1965-1985. Berdasarkan rencana ini telah ditetapkan peruntukan wilayah kota agar memudahkan arah perkembangan kota, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Pusat pemerintahan
- b. Wilayah pengembangan kebudayaan dan kerohanian
- c. Wilayah pusat kegiatan politik nasional dan Internasional
- d. Wilayah perdagangan dan usaha
- e. Wilayah industri
- f. wilayah kewismaan
- g. wilayah rekreasi
- h. Wilayah perlengkapan kota serta perhubungan (Master Plan 1965-1985:1).

Sedangkan bentuk dan arah perkembangan kota ditentukan adanya pemekaran kota yang seimbang kesegala arah. Titik pancar perkembangan wilayah kota adalah tugu Monas dengan radius 15 km. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah maka pemerintah DKI mencadangkan areal tanah berbagai peruntukan dalam wilayah Jakarta sebagai berikut :

Kota inti	180 km
penambahan areal untuk perumahan	150 km
industri	70 km
usaha-usaha lain	21,5 km
Jumlah	421,5 km

Akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat maka saat ini kepadatan penduduk Jakarta terhadap 635 km² adalah 82 orang/Ha (Bianpoen 1977:12,13).

Selain itu usaha lain yang dilakukan Pemda DKI Jakarta adalah membuat rencana bersama Pemda Jawa Barat untuk pengembangan

wilayah yang meliputi kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi yang dikenal dengan "JABOTABEK". Kerjasama pengembangan Jabotabek ini diharapkan akan banyak membantu meringankan tekanan penduduk di Jakarta (Gita Jaya 1977:223).. Konsep perencanaan diambil dari model urbanisasi "Randstad" di Belanda yaitu "Bundled deconcentration". Ada 2 model yang akan diterapkan pada Jabotabek, pertama adalah model konsentris yang memberikan kemungkinan perkembangan dari pusat pada garis Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi. Maka ditetapkanlah model yang sangat mungkin yaitu model linear dengan perkembangan segi empat (lihat gambar 1). dengan 3 alasan:

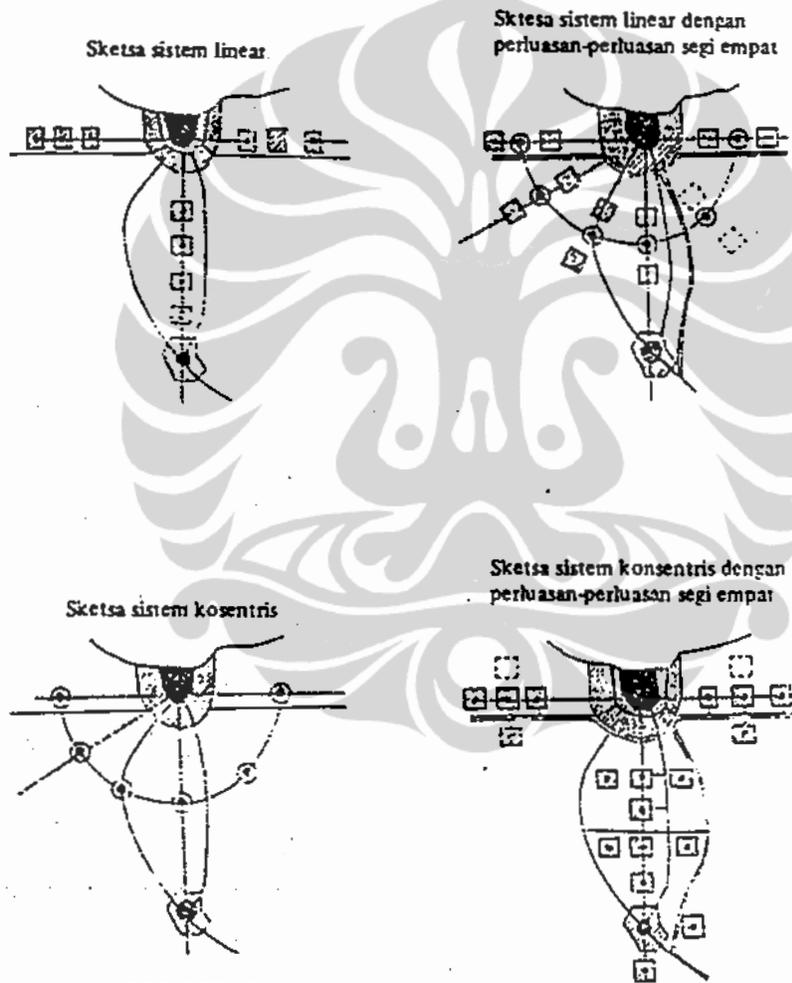
1. model linear dapat diterapkan karena ada kesesuaian dengan kecenderungan ribbon development sepanjang garis-garis radius kota sebagaimana perluasan jaman Batavia.
2. Membutuhkan lebih sedikit infrastruktur untuk transportasi dan sarana umum dari pada model konsentris
3. Memerikan kemungkinan adanya ruang terbuka antara pusat-pusat (Giebels 1986:113).

Dengan semakin luas areal pembangunan yang terjadi di Jakarta maka terjadilah penyempitan areal pertanian, maka oleh para peneliti FEUI dan Bappenas untuk menggunakan jalur hijau sebagai areal pertanian.

Ada daerah pertanian hortikultura yang potensial, untuk dikembangkan di wilayah DKI Jakarta, yaitu :

1. kecamatan Pasar Rebo
2. Kecamatan Kramat Jati
3. Kecamatan Pasar Minggu

Model-model Dekonsentrasi Terkelompok



Sumber: JABOTABEK 1973: 127, 129
Giebels 1986:

4. Kecamatan Kebayoran lama/Cilandak

5. Kecamatan Kebon Jeruk

IV.2 Pengembangan prasarana umum

a. Jalan dan Jembatan : Selama ini telah direhabilitasi pembangunan jalan ekonomi sepanjang 465 Km dan jalan lingkungan sepanjang 818 Km (Gita Jaya 1977:239). Penambahan jalan masih diprioritaskan pada jalan-jalan daerah kampung yang dilaksanakan melalui program MHT dan penambahan jalan desa yang merupakan jalan lingkungan di wilayah pinggiran yang dilaksanakan melalui program Bantuan Inpres Dati II (Repelita III 1979/1980-1983/1984:85).

b. Angkutan Umum dan lalu-lintas : Perkembangan jalan pada kenyataannya tidaklah dapat menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat rata-rata per tahun 16,74%. Hal ini tentunya akan berakibat kemacetan lalu-lintas. Untuk itu kemudian dibuat peraturan dengan sistem satu lintasan dan pada tahun 1977 telah digunakan komputer untuk pengaturan lampu lalu-lintas. Pola angkutan umum yang ditetapkan adalah berdasarkan pada pola angkutan umum dasar dengan kereta api dan bus. Dan sebagai pelengkap adalah kendaraan kecil beroda tiga, kemudian taxi dan oplet. Untuk itu dibangun pula terminal-terminal bis kota dan antar kota. Yang sampai saat ini telah dibangun 22 buah terminal bis kota dengan 476 buah tempat pemberhentian bis (Gita Jaya 1977:241,242;Repelita III 1979/1980-1983/1984:90).

c. Listrik : Pada masa ini telah terpasang pembangkit listrik tenaga uap di Muara Karang, Pembangkit tenaga gas di Pulo Gadung dan PLTG di Tanjung Priok. Sampai saat ini telah tersedia 886,5

MW dengan jatah 139 watt per kapita. Di samping itu juga telah diadakan pemurnaan jaringan distribusi yang diikuti dengan perubahan tegangan dari 10 volt ke 220 volt dan juga telah dibangun gardu listrik sebanyak 571 buah (Repelita III 1979/1980-1983/1984:95).

d. Gas : Sampai saat ini pemakaian gas telah mencapai 600 X 106 kalori/bulan/unit konstruksi dan kebutuhan ini akan terus meningkat. Untuk itu Pemda DKI telah memberikan bantuan kepada PN Gas dalam hal saluran distribusi yang rencananya meliputi pembaharuan dan penyesuaian sistem distribusi yang tersebar dalam 5 wilayah yang panjang keseluruhannya 250 km. Oleh pemerintah pusat juga diberi bantuan yaitu penyelesaian pemasangan pipa transmisi Cimalaya-Cilegon-Imanggis ke Jakarta melalui Jagorawi (Gita Jaya 1977:254; Repelita III 1979/1980-1983/1984:96).

e. Penyediaan air bersih : Penyediaan air bersih bersumber pada instansi penjernihan air Pejompongan dan Cibuarial Bogor. Kapasitas air yang dihasilkan masih terbatas apabila kebutuhan air minum per kapita 180-200 liter/hari. Yang menjadi masalah pula adalah menurunnya air dari Cibuarial, sehingga masalahnya bertambah bukan hanya bagaimana menaikkan produksi air tetapi penyediaan jaringan distribusi air dari produksi menuju langganan. Maka dibangun tempat penjernihan air untuk bagian timur Jakarta dengan kapasitas 4.000 liter/detik. Juga bekerja sama dengan Belanda untuk pembangunan "Miniplant Cilandak" guna penyediaan air minum daerah Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Barat dibangun instalasi kecil Jelambar (Gita Jaya 1977:250,251).

f. Telekomunikasi : Dengan bantuan dan pinjaman dari Bank

Dunia, pemerintah Jepang, Belanda dan Jerman diharapkan dapat menambah kapasitas sentral-sentral telepon di Jakarta. Pada tahun 1976 telah berjalan penambahan telepon sebanyak 56.060, merupakan pelayanan yang diutamakan di daerah Kebayoran, Jatinegara, Slipi, Gajah Mada, Pulo Gadung, Rawamangun dan Ancol. Dengan penambahan ini maka keseluruhan sambungan telepon mencapai 101.300. Untuk tahun 1981 telah ditargetkan sebanyak 262.800 pesawat (Gita Jaya 1977:255).

g. Perbaikan kampung : 60% dari seluruh penduduk kota Jakarta adalah kelompok penduduk yang terpaksa harus menempati kampung-kampung, sehingga perhatian terhadap kelompok ini haruslah lebih banyak lagi. Adapun yang menjadi sasaran pokok dalam perbaikan kampung adalah perbaikan sarana berupa : jalan, saluran, penyediaan air bersih, penyediaan MCK dan puskesmas yang mana proyek tadi dikenal dengan proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT).

Sampai dengan tahun 1975/1976 jumlah kampung yang telah diperbaiki meliputi 4.694 Ha yang menyangkut penduduk sejumlah 1.965.000 orang yang mencakup 24 kampung. Sampai tahun 1979 kampung yang direhabilitasi berjumlah 330 buah (Repelita III 1979/1980-1983/1984:114; Gita Jaya 1977:259,260).

V. Rangkuman

Secara umum arah perkembangan kota Jakarta sejak tahun 1964 hingga tahun 1980 memperlihatkan tahap-tahap perkembangan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1940 terlihat adanya dua kutub perkembangan, yaitu Tanjung Priok dan daerah Pasar Ikan.
- b. Pada tahun 1952 terlihat adanya perkembangan ke arah Timur dan

Selatan serta pengembangan daerah satelit Kebayoran Baru. Perkembangannya masih bersifat konsentris, tetapi terbatas pada daerah yang tidak terkena banjir. Sementara itu daerah Tanjung Priok mulai ada pengembangan ke arah selatan.

c. Sampai tahun 1972 terlihat bahwa tanjung Priok berkembang dua kali lebih besar, sedangkan daerah pusat kota meluas ke arah barat, selatan dan timur melewati areal sekitar 8.750 Ha. Pada saat itu diduga tumbuh daerah Tomang, Slipi, Pal Merah, Cipete, Kuningan, Tebet, Cililitan, Rawamangun, Cempaka Putih dan Sumur Batu.

d. Sampai dengan tahun 1980 nampak kecenderungan pertumbuhan ke arah selatan, yaitu Cipulir, Cilandak, Cipete, Pejaten, Pasar Minggu, Cijantung dan juga ke arah timur, yaitu daerah Klender, Pulo Gadung dan Pondok Bambu (Laporan Sektor perumahan 1981/1982:5,6).

e. Dengan adanya sistem peruntukan wilayah, terlihat adanya keteraturan dalam menentukan perencanaan perkotaan, khususnya bila dibandingkan dengan keadaan sebelum tahun 1965. Dengan bertambah luasnya wilayah Jakarta dapat juga dilihat bahwa daerah pemukiman telah dipusatkan di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, sedangkan daerah Industri lebih ke arah timur mendekati Bekasi.

DAFTAR BUKU

- Bianpoen
1976 "Pola pemukiman di daerah padat penduduk di Jakarta ". Widyapura 1-2, hal.6-39
- Giebels, Lambert
1986 "JABOTABEK": An Indonesian-Dutch concept on Metropolitan planning of the Jakarta region". The Indonesian city : studies in urban development and planning. PJM. Nas (ed.) Dordrecht-Holland/Cinnamison USA: Foris Publication.
- Lierissa, R.Z
1982 "Dari Sunda Kalapa ke Jayakarta", dalam Suryomoharjo (ed.) Beberapa segi sejarah masyarakat-budaya Jakarta. Pemda DKI Jakarta.
- LPEM FEUI
1981 Monografi perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat DKI Jakarta Buku I,2
- Pemda DKI Jakarta
1974 REPELITA DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979. Jakarta.
- 1976 Rencana induk Jakarta (Master Plan 1965-1985), Jakarta.
- 1977 Karya Jaya: kenang-kenangan lima kepala daerah Jakarta 1945-1966. Jakarta.
- 1977 Gita Jaya : Catatan Ali Sadikin, Gubernur kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977. Jakarta.
- 1981/1982 Laporan sektor perumahan dan tanah untuk perumahan. Jakarta

Siswadi
1982

"Perkembangan kota Jakarta : Suatu tinjauan sosial historis", dalam Suryomihardjo (ed) Beberapa segi sejarah masyarakat-Budaya Jakarta. Jakarta Pemda DKI dan DMS DKI ✓

Surjomohardjo
1977

Pemekaran kota Jakarta. Jakarta: Jambatan.

The Liang Gie
1958

Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta. ✓
Djakarta: Kotapradja Djakarta Raya.



PERPUSTAKAAN
VITASASTRA